

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Turki adalah negara dengan wilayah yang terbagi di antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Memiliki letak geografis yang strategis membuat Turki dapat memainkan peran penting dan bertindak cermat di antara Asia, Eropa, Eurasia, Timur Tengah dan Afrika. Namun, sejak menjadi republik, Turki cenderung mengikuti kerangka nilai-nilai Eropa Barat walaupun tetap memasukkan kebudayaan Turki di dalamnya. Kedekatan tersebut mulai terlihat dengan keanggotaan Turki di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tahun 1952, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 1961, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) tahun 1973 dan ‘melamar’ untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1987.<sup>1</sup>

Turki memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Turki adalah salah satu negara MINT (Malaysia, Indonesia, Nigeria dan Turki) yang diperkirakan merupakan negara berkembang besar berikutnya di dunia setelah BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan). Menurut Bank Dunia, Turki masih merupakan salah satu dari 20 ekonomi teratas dunia. Namun, pertumbuhan ekonominya yang berkembang pesat tadinya kini cenderung melambat.<sup>2</sup> Dalam wilayah militer, pada tahun 2015 Turki merupakan salah satu 10 kekuatan militer terkuat di dunia berdasarkan

---

<sup>1</sup> Anton Minardi, *Turkish Foreign Policy to European Union and Its Chance to be a European Union Member*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol 5, Oktober 2016 – Maret 2017. hlm 127

<sup>2</sup> Rosamond Hutt, *4 things to know about Turkey's economy*, World Economic Forum, 3 November 2015, diakses dari <https://www.weforum.org/agenda/2015/11/4-things-to-know-turkey-economy/> pada 14 November 2017

*Credit Suisse Research Institute*.<sup>3</sup> Data dari *Information Handling Services Markit* (IHS Markit) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 pengeluaran Turki untuk militer berada pada peringkat ke-15 dunia.<sup>4</sup>

Ataturk, bapak sekularisme Turki mencetuskan dasar penting kebijakan luar negeri Turki: *Peace at Home Peace in the World*. Konsep tersebut diimplementasikan melalui kebijakan luar negeri dengan beberapa kasus yang mencerminkan Turki sebagai negara demokratis dan selalu menciptakan kondusivitas. Hal tersebut membuat Turki menjadi satu-satunya negara yang diundang ke Liga Bangsa-bangsa tanpa mengirimkan permohonan pada 1932. Turki terus menunjukkan usahanya dalam menciptakan maupun menjaga kondusivitas melalui perjanjian-perjanjian yang diikutinya.<sup>5</sup>

Sejak diangkat menjadi Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin Turki yang keberhasilannya dijadikan model beberapa negara timur. Awal pencapaiannya adalah gerakan kemanusiaan terhadap korban perang NATO yang menjadi perhatian dunia. Hal tersebut menjadi perhatian dunia karena Turki adalah satu-satunya negara anggota NATO yang tidak terlibat dalam aksi militer di Timur Tengah secara langsung. Kemudian, Erdogan juga mengurangi dominasi militer yang selama ini tinggi di Turki. Hal tersebut berdampak positif, yaitu terjalin kembali persahabatan

---

<sup>3</sup> Credit Suisse Research Institute, *The End of Globalization or a more Multipolar World?*, September 2015, diakses dari <http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=EE7A6A5D-D9D5-6204-E9E6BB426B47D054> pada 14 November 2017

<sup>4</sup> Ashley Kirk, *What are the biggest defence budgets in the world?*, The Telegraph News, 27 Oktober 2015, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11936179/What-are-the-biggest-defence-budgets-in-the-world.html> pada 14 November 2017

<sup>5</sup> Anton Minardi, *op.cit.* hlm. 127 – 128

Turki dengan negara-negara Timur Tengah—khususnya Suriah yang tepat bersebelahan dengan Turki.<sup>6</sup>

Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki pada Agustus 2014. Erdogan merupakan presiden pertama Turki yang terpilih melalui pemilihan umum.<sup>7</sup> Erdogan memenangkan 52% suara penduduk Turki. Sebelumnya, Presiden Turki dipilih parlemen, namun referendum pada tahun 2010 membuat warga Turki berhak untuk memilih kepala negara secara langsung. Sampai saat pemilihan tersebut, jabatan presiden di Turki sebagian besar bersifat simbolis. Namun, Erdogan telah berulang kali menggarisbawahi keinginannya untuk menggunakan "kekuatan konstitusionalnya sepenuhnya" untuk menjadi "presiden aktif".<sup>8</sup>

Wilayah Timur Tengah sedang mengalami masa paling sulit di abad ini. Invasi Amerika Serikat di Irak memang telah menimbulkan dampak yang meluas. Kebijakan luar negeri Turki di kawasan ini telah mengalami penurunan. Pada musim gugur 2014, Duta Besar Murat Özçelik menyebutkan bahwa kredibilitas kebijakan luar negeri Turki telah mencapai titik terendah di kawasan Timur Tengah.<sup>9</sup>

Turki menjalin hubungan bilateral dengan beberapa negara Timur Tengah, salah satunya adalah Qatar. Hubungan bilateral kedua negara telah dimulai sejak tahun

---

<sup>6</sup> Mipfa Yusup Prayoga, Skripsi “*Strategi Turki dalam Menghadapi Campur Tangan Amerika Terhadap Konflik Di Suriah 2011-2014*”, Skripsi S1, UMY, 2015, hlm. 1

<sup>7</sup> David L. Phillips, *An Uncertain Ally: Turkey under Erdogan's Dictatorship*, New Jersey: Transaction Publishers, 2017, hlm. 153

<sup>8</sup> Constanze Letsch, *Erdogan emerges victorious in Turkish presidential elections amid low turnout*, The Guardian, 10 Agustus 2014, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/10/turkey-presidential-election-erdogan> pada 15 November 2017

<sup>9</sup> Murat Özçelik, *Turkish Foreign Policy in the Middle East*, Turkish Policy Quarterly, Musim Gugur 2014, diakses dari <http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/turkish-foreign-policy-in-the-middle-east-fall-2014-en.pdf> pada 16 November 2017

1972. Meskipun Turki dan Qatar memiliki beberapa perbedaan mencolok baik dari segi sumber daya, populasi, luas wilayah, sekularisme dan sistem pemerintahan, hal tersebut tidak terlalu menghalangi hubungan kedua negara. Qatar adalah negara yang kaya energi, sedangkan Turki masih sangat bergantung pada impor energi. Walaupun memiliki perbedaan sumber daya, kerjasama kedua negara di bidang ekonomi tidak begitu kuat dibanding kerjasama ekonomi Turki dengan negara-negara Timur Tengah yang lain.<sup>10</sup>

Dalam bidang militer, Turki dan Qatar telah menyepakati beberapa perjanjian kerjasama. Pada tahun 2007, Ankara dan Doha menandatangani perjanjian kerjasama industri pertahanan. Tahun 2012 kedua belah pihak juga menandatangani perjanjian pelatihan militer.<sup>11</sup> Hubungan bilateral kedua negara semakin erat saat menandatangani serangkaian kesepakatan di Ankara pada tahun 2014, termasuk sebuah memorandum bersama untuk membentuk "Komite Strategis Tertinggi" (*Supreme Strategic Committee*).<sup>12</sup> "Komite Strategis Tertinggi" antara Turki dan Qatar didirikan pada tahun 2014 sebagai mekanisme bilateral untuk dialog dan kerjasama tingkat tinggi. Pertemuan pertama Komite tersebut diadakan di Doha pada tanggal 2 Desember 2015. Pertemuan kedua berlangsung di Trabzon pada tanggal 18 Desember 2016 di bawah kepemimpinan Erdogan dan Tamim bin Hamad Al-Thani. Pada kesempatan kedua pertemuan tersebut,

---

<sup>10</sup> Birol Bařkan, *Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East*, Georgetown University, Doha, 2016, hlm. 2

<sup>11</sup> Paul Cochrane, *Revealed: Secret details of Turkey's new military pact with Qatar*, Middle East Eye, 29 Januari 2016, diakses dari <http://www.middleeasteye.net/news/turkey-qatar-military-agreement-940298365> pada 15 November 2017

<sup>12</sup> Hurriyet Daily News, *Qatar, Turkey take bold step for strategic cooperation*, 19 Desember 2014, diakses dari <http://www.hurriyetdailynews.com/qatar-turkey-take-bold-step-for-strategic-cooperation-75852> pada 15 November 2017

sejumlah kesepakatan, protokol dan nota kesepahaman ditandatangani antara Turki dan Qatar.<sup>13</sup>

Setelah absen selama 100 tahun, Turki secara militer kembali ke Teluk Persia dan meningkatkan eksistensinya di luar negeri. Pada tanggal Desember 2015, saat kunjungan presiden Turki ke Qatar, Erdogan dan Tamim bin Hamad Al-Thani mengumumkan rencana pembentukan pangkalan militer Turki di Doha Qatar. Pangkalan militer tersebut adalah pangkalan militer pertama Turki di Teluk Persia.<sup>14</sup> Pangkalan militer Turki di Doha Qatar ini merupakan penempatan militer terbesar nomor dua Turki di luar negeri setelah Siprus. Pangkalan tersebut dibangun untuk angkatan udara dan angkatan laut yang diperkirakan akan menjadi rumah bagi 3.000 tentara Turki.<sup>15</sup>

Qatar adalah rumah dari pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, Al Udeid. Pangkalan tersebut merupakan salah satu pangkalan yang memiliki landasan pacu terpanjang di Timur Tengah. Al Udeid juga merupakan rumah bagi markas Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) 83 *Expeditionary Air Group*, yang mengoperasikan pesawat RAF di Timur Tengah.<sup>16</sup> Al-Udeid dibangun Qatar dengan menghabiskan biaya lebih dari \$ 1 miliar untuk kebutuhan militer Amerika Serikat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, *Bilateral Political Relations between Turkey and Qatar*, diakses dari <http://www.mfa.gov.tr/turkey-qatar-relations.en.mfa> pada 15 November 2017

<sup>14</sup> Paul Cochrane, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Sputnik News, *Turkish Multi-Purpose Military Base in Qatar Starts Operating*, 28 April 2016, diakses dari <https://sputniknews.com/middleeast/201604281038772148-turkey-base-qatar/> pada 16 November 2017

<sup>16</sup> Jamie Merriell, *Qatar crisis could have major implications for massive US-UK air base, analysts say*, Middle East Eye, 8 Juni 2017, diakses dari <http://www.middleeasteye.net/news/qatar-crisis-could-have-major-implications-us-uk-air-base-958559385> pada 15 November 2017

<sup>17</sup> Jim Scitutto, *U.S. Troops Preparing for War in Qatar*, ABC News, 24 September 2002, diakses dari

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncul rumusan masalah: **Mengapa Turki membangun pangkalan militer di Doha Qatar?**

## C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis dan menjawab pokok permasalahan di atas, maka penulis menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional.

### 1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri adalah rencana tindakan atau strategi yang dikembangkan para pembuat keputusan suatu negara untuk menghadapi negara atau entitas internasional yang lain yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Ketika bermain peran dalam hubungannya di dunia internasional, negara-negara tersebut membawa kepentingan negara dan tujuan negara. Oleh karena itu, politik luar negeri tidak bisa diputuskan secara sembarangan karena memiliki resiko dan taruhan yang tinggi.<sup>18</sup>

Pada umumnya, keputusan luar negeri suatu negara adalah serangkaian keputusan yang berhubungan dengan fenomena antarbangsa. Kebijakan tersebut diterbitkan negara tertentu untuk menyikapi berbagai isu yang ada dan berkembang dengan negara lain. Mappa Nasrun menjelaskan kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan di dalam negeri. Keadaan dan perkembangan sistem politik internasional juga dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi,

---

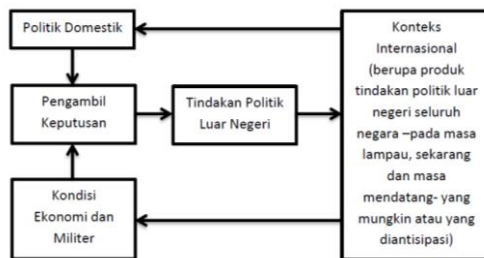
<http://abcnews.go.com/WNT/story?id=130093&page=1> pada 16 November 2017

<sup>18</sup> Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010 hlm. 3

kebijaksanaan luar negeri pada dasarnya dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal.<sup>19</sup>

Pada tulisan ini penulis memutuskan untuk menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin. Teori ini dapat digunakan karena menjelaskan mengenai bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya. Apabila proses pembuatan kebijakan luar negeri menurut Coplin digambarkan, akan menjadi seperti bagan berikut:<sup>20</sup>

**Gambar 1.1** Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri



Coplin menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi tiga faktor dasar, yaitu situasi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta kedudukan negara dalam konteks sistem

<sup>19</sup> Mappa Nasrun, *Indonesian Relations with the South Pacific Countries: Problem and Prospect*, Desertasi, UNHAS, 1990, hlm. 98. dalam Soft Power dalam Politik luar Negeri Indonesia, F.X. Wawolangi, FISIP UI, 2010, diakses dari <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132946-T%2027791-Politik%20luar-Tinjauan%20literatur.pdf> pada 15 November 2017

<sup>20</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Edisi Kedua) Terjemahan Marsedes Marbun, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003, hlm. 30

internasional. Apabila diuraikan akan menjadi seperti berikut:<sup>21</sup>

*Pertama*, kondisi politik dalam negeri. Coplin menjelaskan bahwa kondisi politik dalam negeri suatu negara adalah salah satu variabel penentu dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Hal tersebut disebabkan karena terdapat aktor-aktor politik dalam negeri (*policy influencer*) yang mempengaruhi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri. Hubungan ini disebut Coplin sebagai sebuah sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) yang bekerja seperti simbiosis mutualisme. Bagi pengambil keputusan politik luar negeri, *policy influencer* adalah sumber dukungan untuk rezim mereka. Sementara bagi *policy influencer*, pengambil keputusan dibutuhkan untuk memperlancar jalan politik dalam negeri atau mendapat penghormatan dari negara lain.<sup>22</sup> Terkadang tidak seluruh permintaan *policy influencer* terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi seluruhnya, kemungkinan besar dukungan terhadap pengambil keputusan tersebut akan hilang.

Dalam politik luar negeri, *policy influence system* ini memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan. Coplin membagi peran *influencer* politik luar negeri ke dalam empat kategori, yaitu birokrat (*bureaucratic influencer*), partisan (*partisan influencers*), kelompok kepentingan (*interest influencer*) dan opini publik (*mass influencer*).<sup>23</sup> Dalam kasus penelitian ini pertimbangan pengambil keputusan dipengaruhi tiga aktor, yaitu birokrat, partisan dan kelompok kepentingan.

---

<sup>21</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992, hlm. 29 – 30

<sup>22</sup> William D. Coplin, 2003, *op.cit.* hlm. 74 – 76

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 81



Birokrat (*bureaucratic influencer*) terdiri dari individu atau organisasi dalam lembaga eksekutif pemerintah. Birokrat berfungsi untuk membantu menyusun dan melaksanakan kebijakan. Namun, karena kedua pihak—kelompok pengambil keputusan dan birokrat—bekerja di dalam satu lembaga, terkadang anggota birokrasi juga merupakan kelompok pengambil keputusan. Coplin menyebutkan bahwa pada kondisi seperti itu, sulit membedakan birokrat yang bertindak sebagai *policy influencer* dan pengambil keputusan.<sup>24</sup>

Karena Turki menganut sistem pemerintahan parlementer saat kasus ini terjadi, posisi birokrat dijabat presiden, menteri-menteri dan perdana menteri. Posisi presiden yang baru diraih Erdogan saat itu dipandang memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan kebijakan. The Telegraph News menyebutkan bahwa Erdogan adalah salah satu pemimpin paling kharismatik di dunia dan merupakan pemimpin Turki yang paling kuat setelah Attaturk.<sup>25</sup> Erdogan juga menjadi *Person of the Year* pada tahun 2011 menurut majalah Time karena disebut sebagai sosok “Islamis moderat dan tegas membela demokrasi sekuler”, serta “pemimpin dunia yang paling dikagumi di kalangan orang Arab”.<sup>26</sup>

Partisan (*partisan influencers*) didefinisikan sebagai representasi dari rakyat yang menginterpretasikan tuntutan rakyat menjadi agenda

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 82

<sup>25</sup> Raziye Akkoc, *Turkey's most powerful president since Ataturk: A profile of Recep Tayyip Erdogan*, The Telegraph News, 20 April 2015, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11548369/Turkey-s-most-powerful-president-since-Ataturk-A-profile-of-Recep-Tayyip-Erdogan.html> pada 17 November 2017

<sup>26</sup> Nick Carbone, *Recep Tayyip Erdogan: People's Choice for TIME's 2011 Person of the Year*, Time Magazine, 12 Desember 2011, diakses dari <http://newsfeed.time.com/2011/12/12/recep-tayyip-erdogan-peoples-choice-for-times-2011-person-of-the-year/> pada 17 November 2017

politik. Terdapat perwakilan partai-partai politik di dalam parlemen yang memiliki peran dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. *Partisan influencers* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri apabila berhubungan dengan kebijakan dalam negeri yang bersifat kritis.

Turki adalah negara demokrasi parlementer yang menganut sistem multi-partai. Kebijakan Turki dalam mengadakan kerjasama tingkat tinggi dengan Qatar yang membuahkan hasil rencana pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar tidak terlepas dari pengaruh partai politik di Turki. *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) yang merupakan partai politik terpopuler di Turki dan partai-partai politik lain juga menjadi mempengaruhi keputusan-keputusan Erdogan.

Kelompok kepentingan (*interest influencer*) adalah kelompok yang bersatu atas dasar kesamaan kepentingan dimana cakupan kepentingan tersebut tidak luas. Oleh karena itu kelompok ini berbeda dengan kelompok partai. Dalam banyak hal, kepentingan kelompok ini bersifat ekonomis. Biasanya, *interest influencer* memiliki andil besar karena berasal dari organisasi dan kelompok informal dari beragam kepentingan—baik kepentingan ekonomis maupun non-ekonomis, memiliki sumber finansial besar sehingga dapat mempengaruhi pembuat keputusan, terutama dalam negara demokratis.

Beberapa cara yang digunakan *interest influencer* untuk membentuk dukungan atas kepentingan mereka adalah orasi atau kampanye. Orasi atau kampanye tersebut ditujukan baik kepada birokrat, kelompok partai maupun kepada pembuat kebijakan. Kelompok ini dapat menjanjikan dukungan finansial ataupun mengancam dengan menarik dukungan finansialnya. Terkadang kampanye publik dibiayai kelompok ini

demikian membangun dukungan untuk kepentingannya yang kemudian dapat menekan pengambil kebijakan.

Turki yang baru saja menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2014 membuat kondisi politik dalam negeri menjadi cukup dinamis. Terlebih lagi pemilu tersebut adalah yang pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Terpilihnya Erdogan sebagai Presiden memperkuat alasan diputuskannya kebijakan membangun pangkalan militer Turki di Doha Qatar. Perjanjian pertahanan dengan Qatar dan keputusan pembangunan pangkalan militer tidak jauh diputuskan setelah dirinya terpilih menjadi presiden. Erdogan yang telah lama berkecimpung dalam kepemimpinan Turki beserta partai-partai dan kelompok kepentingan yang ada di Turki tentu memiliki andil dalam keputusan pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar.

*Faktor kedua* yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Kemampuan ekonomi dan militer adalah hal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Coplin menyebutkan bahwa kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena pada umumnya semakin tinggi GNP (pendapatan nasional negara) suatu negara, semakin tinggi pula kemampuannya dalam mewujudkan kekuatan militer, terutama untuk kepentingan jangka panjang.<sup>27</sup> Besarnya anggaran yang berpengaruh pada kekuatan militer suatu negara diwujudkan oleh kemampuan ekonomi yang besar pula. Sebaliknya, apabila terjadi kesulitan ekonomi dalam suatu negara, daya beli negara kepada industri pertahanan akan melemah. Turki adalah salah satu negara anggota G-20. Berdasarkan *Credit Suisse Research Institute*, Turki merupakan salah satu dari 10 kekuatan militer terkuat

---

<sup>27</sup> William D. Coplin, *op.cit.* hlm. 126

di dunia.<sup>28</sup> IHS Markit juga menyebutkan bahwa pada tahun 2014 pengeluaran Turki untuk militer berada pada peringkat ke-15 dunia.<sup>29</sup> Hal tersebut mencerminkan bahwa kekuatan ekonomi dan militer Turki memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan pembangunan pangkalan militer di Doha Qatar. Keputusan yang tidak kecil tersebut tidak mungkin muncul tanpa disokong kemampuan ekonomi dan militer Turki yang tidak bisa dianggap lemah.

Kemudian, faktor *ketiga* adalah konteks internasional. Faktor ini merupakan situasi internasional dimana suatu negara menjalankan politik luar negeri yang bertujuan untuk mempengaruhi negara-negara lain. Keputusan politik suatu negara dipengaruhi oleh hubungan politik dengan negara-negara lain di lingkungannya.

Keputusan Turki untuk membangun pangkalan militer di Doha Qatar tidak terlepas dari dinamisnya kondisi di Qatar khususnya dan Timur Tengah pada umumnya. Situasi yang rumit di Timur Tengah pada saat itu terutama Suriah tidak menghalangi Turki untuk membangun pangkalan militernya di Teluk. Turki yang selama 100 tahun absen dalam eksistensinya di Teluk Persia kini membangun pangkalan militer yang disebut sebagai penempatan terbesar kedua Turki di luar negeri setelah Siprus. Terlebih lagi Qatar merupakan rumah bagi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Tentu Turki memiliki pertimbangan konteks internasionalnya sendiri mengenai pembangunan pangkalan militer di Doha Qatar tersebut.

Berikut adalah bagan proses pembuatan kebijakan Turki mengenai pembangunan pangkalan militer di

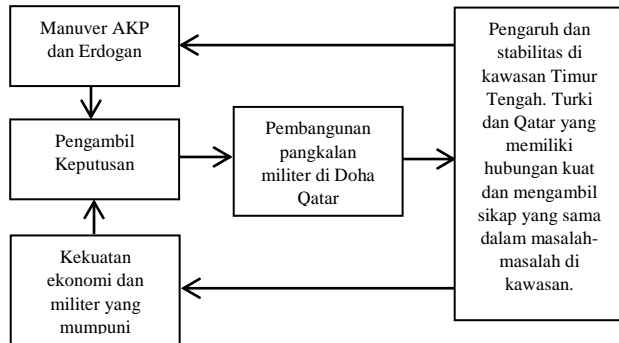
---

<sup>28</sup> Credit Suisse Research Institute, *loc.cit.*

<sup>29</sup> Ashley Kirk, *loc.cit.*

Doha Qatar menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri Coplin:

**Gambar 1.2** Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Turki Mengenai Pembangunan Pangkalan Militer di Doha Qatar



Untuk memahami suatu kasus politik luar negeri, yang harus terlebih dahulu dijelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional negara tersebut. Dalam artian bahwa politik luar negeri dapat dianggap sebagai penyeimbang atau pemenuh selisih antara kualitas dan kuantitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional.

## 2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kedua yang akan digunakan adalah konsep kepentingan nasional (*national interest*). Konsep kepentingan nasional adalah salah satu konsep yang populer dalam analisa hubungan internasional. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Lebih lanjut, negara-bangsa juga harus bisa mempertahankan identitas fisiknya (teritorial), mempertahankan identitas politiknya (rezim ekonomi-politik) dan

identitas kulturalnya (norma etnis, religius, linguistik dan sejarah).<sup>30</sup>

Dalam Kamus Hubungan Internasional yang ditulis Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah:

“Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (*decision maker*) suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan secara khas dari berbagai elemen yang merupakan kebutuhan yang paling vital dari suatu negara berdaulat, yaitu preservasi diri, kemerdekaan, integritas wilayah, ekonomi, militer dan keamanan.”<sup>31</sup>

Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan sosial, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas negaranya.<sup>32</sup> Mohtar Mas’oed juga menjelaskan bahwa arti minimum yang inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah keberlangsungan hidup.<sup>33</sup>

Kepentingan nasional pada umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Dalam rangka mewujudkan kepentingan, diambil suatu tindakan yaitu kebijakan atau *policy*.<sup>34</sup> Hubungan dan kepentingan pemerintah dan rakyatnya ditekankan pada kebijakan dalam negeri. Sedangkan hubungan dan kepentingan antarpemerintah suatu negara dan

---

<sup>30</sup> Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 140 – 141

<sup>31</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary* (3rd Edition), terjemahan Wawan Juanda, Bandung: Putra A. Bardin, 1999, hlm 7

<sup>32</sup> Tulus Warsito, *Teori-teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*, Yogyakarta: Bigrif Publishing, 1998, hlm. 29

<sup>33</sup> Mohtar Mas’oed, *op.cit.* hlm. 141

<sup>34</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, *op.cit.* hlm. 117

negara lain atau organisasi internasional ditekankan pada kebijakan luar negeri.

Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya ada 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut:<sup>35</sup>

*Pertama*, preservasi diri (*self preservation*). *Self preservation* adalah hak negara untuk mempertahankan eksistensinya. *Self preservation* dapat didefinisikan juga sebagai usaha suatu negara dalam rangka mempertahankan identitas negaranya di tengah perkembangan global, dimana hal tersebut dibutuhkan untuk pengakuan dari dunia luar. Mempertahankan kelangsungan hidup negara dalam pergaulan internasional adalah hal yang penting dari *self preservation*.

Kategori *kedua* adalah kemerdekaan (*independece*). Kemerdekaan adalah suatu wujud masa depan suatu negara yang bebas dari dominasi atau intervensi asing. Kemerdekaan membuat negara dapat menentukan masa depannya sendiri serta menyelenggarakan pemerintahan secara efektif.

*Ketiga*, keamanan militer (*military security*). Keamanan suatu negara dapat dinilai dari kekuatan militer untuk menjaga atau mempertahankan keamanan teritorial dari kekuatan militer negara lain atau kelompok separatis. Faktor ini juga menjadi faktor penting untuk menjaga negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Militer suatu negara juga memiliki peran penting dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas dalam negeri.

*Keempat*, integritas wilayah (*territory integrity*). Integritas wilayah adalah kepentingan yang sangat penting karena hal ini dapat menjamin sebuah

---

<sup>35</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University, California: ABL-Clio, 1980, hlm. 27

kesinambungan bernegara dalam wujud kesatuan wilayah yang saling mendukung antara satu dan lainnya.

*Kelima*, ekonomi (*economic well-being*). Faktor ini merupakan faktor penting karena ekonomi merupakan variabel penting yang menentukan kemajuan suatu negara. Selain itu, faktor dominan dalam menentukan citra suatu negara di mata internasional adalah faktor ekonomi negara tersebut.

Kelima konsep di atas memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Misalnya, keamanan akan sulit terwujud tanpa militer yang memadai. Militer yang memadai juga tidak akan tercapai tanpa kondisi ekonomi yang baik. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya.

Dengan menggunakan Teori Jack Plano dan Roy Olton ini, penulis beranggapan bahwa *Military Security* adalah unsur yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pembahasan mengenai pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar.

Pangkalan militer yang dibangun pada prinsipnya menjadi bagian dari implementasi politik luar negeri yang telah tersusun secara sistematis, terkait dengan keberadaan Turki sebagai negara dengan sistem politik-pemerintahan yang modern. Politik luar negeri yang dijalankan Turki merupakan bagian dari keputusan formal yang legitimasinya telah memenuhi serangkaian pembahasan dan pertimbangan, baik pada tingkat pemerintah, yang dalam hal ini kepemimpinan Erdogan hingga Kementerian Pertahanan Turki, serta persetujuan dari parlemen negara ini. Semua implementasi politik luar negeri dijalankan untuk mendukung kepentingan nasional.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah



dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sementara (hipotesis) untuk penelitian di dalam skripsi ini.

Alasan dan kepentingan Turki membangun pangkalan militer di Doha Qatar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Manuver AKP sebagai partai yang berkuasa dalam politik luar negeri Turki.
- 2) Kekuatan militer Turki yang mumpuni sehingga dapat memperluas pengaruhnya ke Timur Tengah.
- 3) Kesamaan sikap Turki dan Qatar dalam masalah-masalah stabilitas di Timur Tengah.

### **E. Ruang lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari topik atau tujuan yang diinginkan. Penulis memberi batasan penelitian pada awal kesepakatan pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar sampai dengan realisasi pembangunan pangkalan militer, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017. Namun, penulis tidak menutup kemungkinan adanya pendukung penulisan yang terjadi di luar jangka waktu tersebut dengan memerhatikan relevansinya terhadap penelitian.

### **F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dijabarkan secara deskriptif untuk memberikan fakta yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan) yaitu mengumpulkan data yang diambil dari buku, internet, majalah, jurnal, artikel dan berita yang dimuat di media cetak dan media elektronik serta catatan atau sumber informasi valid lainnya yang relevan dengan penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah Bab pendahuluan dari dari skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, hipotesis, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas mengenai kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah. Pada sub-bab pertama diuraikan kebijakan keamanan Turki yang terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu politik Turki dan keamanan Turki. Pada sub-bab ke-dua terdapat pembahasan para pembuat keputusan dan kelompok kepentingan Turki yang diuraikan secara terpisah menjadi dua bagian. Pada sub-bab terakhir, terdapat pembahasan hubungan Turki dengan Qatar.

Bab III dalam skripsi ini membahas pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar. Pada sub-bab pertama diuraikan rencana pembangunan pangkalan militer Turki. Kemudian, kesepakatan pembangunan pangkalan militer Turki dengan Qatar dibahas pada sub-bab ke-dua. Pada sub-bab ke-tiga dijelaskan perihal pro dan kontra pembangunan pangkalan militer Turki di Doha Qatar.

Bab IV memaparkan uraian alasan Turki membangun pangkalan militer di Doha Qatar. Pada sub-bab pertama, dijelaskan manuver AKP sebagai partai yang berkuasa dalam politik luar negeri Turki. Kemudian, sub-bab selanjutnya membahas mengenai kekuatan militer Turki yang mumpuni sehingga dapat memperluas pengaruhnya ke Timur Tengah. Sub-bab terakhir memaparkan kesamaan sikap antara Turki dan Qatar dalam berbagai masalah stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada Bab V atau Bab penutup, seluruh pembahasan di dalam skripsi ini dirangkum dan disimpulkan secara singkat dan padat untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dalam penelitian ini.